

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Kurang lebih tiga abad yang lalu, Liberalisme melalui sistem mekanisme pasar yang digunakan untuk berinteraksi di dalam sebuah negara pernah hadir didalam kehidupan sehari-hari bangsa Eropa dan Amerika Serikat. Namun seiring berkembangnya Hubungan Internasional yang memudahkan interaksi baik antar negara maupun secara individual melalui teknologi informasi, Liberalisme yang dianut sebagian besar negara-negara Eropa, juga mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut mengubah mekanisme pasar yang tidak lagi hanya ada di dalam negeri, namun juga beralih ke luar negeri baik secara bilateral, regional, maupun global. Investasi, barang produksi juga merambah sampai keluar negeri sesuai hukum *supply* dan *demand*.

Selain itu, transformasi lain adalah, pemerintah juga dituntut untuk menghormati kinerja pasar sebagai salah satu jitu bukan untuk memakmurkan negara seperti halnya liberalisme, namun memakmuran individu. Liberalisme baru ini, saat ini kita sebut dengan Neo-Liberalisme. Neo-Liberalisme, yang dianggap mampu membuat keuntungan signifikan oleh para pendukungnya, memang benar adanya. Namun prinsip keuntungan individual akhirnya mengakibatkan keegoisan dan kesenjangan. Banyak dari pengusaha penganut Neo-liberal, mengambil keuntungan secara sepihak dan malah justru bertindak

sesuka hatinya dan merugikan orang lain atau bahkan negara lain. Pada akhirnya kesenjangan pun terjadi. Saat ini penjajahan dilakukan secara halus. Melalui sektor ekonomi, merambah ke sektor penting lainnya seperti politik, dan sosial budaya. Akhirnya membuat yang lemah tergantung dan ditindas oleh yang berkuasa.

Ketergantungan ini pada akhirnya menciptakan suatu monopoli dunia yang dimulai dari penjajahan secara ekonomi, lalu politik dan sosial budaya. Era Globalisasi yang digembar-gemborkan mampu mengubah tatanan dunia kearah yang lebih baik, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem Neo-Liberalisme membuat ketergantungan Negara lemah terhadap negara kuat sangat kental sehingga terjadi banyak terjadi penindasan dan penjajahan secara halus oleh Negara-negara kuat ini.

Ketertarikan penulis terhadap judul Konsep Welfare State Mahatma Gandhi Sebagai Ideologi Alternatif Untuk Menahan Neo-Liberalisme (studi kasus Negara India) terletak pada percobaan penulis dalam mencari sebuah alternatif untuk menahan bahaya laju Neo-Liberalisme melalui konsep *welfare state* yang digagas oleh Mahatma Gandhi. Serta ketertarikan penulis untuk menganalisa lebih lanjut bagaimana falsafah-falsafah Gandhi mampu diimplementasikan di India masa kini dengan harapan memberikan pengetahuan baru serta mampu menjadi ilmu yang berguna di masa yang akan

## **B. Latar Belakang Masalah**

Jika mendengar kata "Neo-Liberalisme", mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita adalah monopoli pasar serta kekuatan negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa. Era Globalisasi memang merupakan era dimana penjajahan secara fisik tidak lagi berlaku, melainkan penjajahan secara ideologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Kapitalisme, merupakan landasan utama Neo-Liberalisme dalam bertindak serta mengambil kebijakannya. Kapitalisme sendiri mempunyai makna pengembangan azas hak milik pribadi yang pada intinya mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apa saja secara terang-terangan. Dalam tatanan dunia Internasional baru, asas inilah yang telah telah melahirkan Neo-Liberalisme, atau Liberalisme baru di era ini. Neo-liberalisme merupakan sebuah wabah yang sangat mengerikan bagi negara-negara berkembang. Negara berkembang dipaksa untuk tunduk terhadap sistem ekonomi dunia yang menggerogoti segala aspek kehidupan masyarakat negara-negara berkembang. Segala bentuk potensi baik alam maupun manusia dibabat habis demi kepentingan kas Negara-negara penganut Neo-liberalisme. Neo-liberalisme sendiri secara garis besar merupakan perwujudan liberalisme lama yang mengalami pergeseran pasca perang dunia pertama seiring dengan semakin jelasnya persaingan bebas secara ekonomi politik di dunia Internasional. Neo-Liberalisme sendiri mempelajari tentang bagaimana integrasi membudaya dirinya sendiri

Kerjasama di satu wilayah akan membuka jalan bagi kerjasama di wilayah lain.<sup>1</sup> Perbedaan antara Liberalisme dan Neo-Liberalisme hanya terletak secara kontekstual, dimana Liberalisme klasik hanya berlaku secara domestik, sementara Neo-Liberalisme, berlaku secara universal dan Internasional. Hal ini dikarenakan, Neo-Liberalisme menciptakan aturan-aturan pasar yang disamakan bagi seluruh negara melalui lembaga-lembaga Internasional yang bergerak di bidang perekonomian dunia. Meski mulai muncul pasca perang dunia pertama, Neo-liberalisme mulai jelas tampak pada akhir perang dunia kedua tahun 1945 berakhir dan mulai berkembang memasuki fase perang dingin tahun 1970.

Seiring dengan pertumbuhan demokrasi yang cepat saat itu, kaum Neo-liberalis juga mengambil peran sebagai aktor perdamaian dan anti perang serta menggantinya menjadi sebuah jalinan koorporasi dan kerjasama ekonomi agar dapat terhindar dari perang. Dalam perkembangannya, seiring dengan tumbuhnya kerjasama ekonomi antar negara, banyak forum-forum kerjasama baik Internasional, regional, maupun bilateral yang mengakibatkan negara-negara yang berkembang atau dunia ketiga merasa perlu untuk menggantungkan diri kepada Negara-negara besar sehingga bisa terhindar dari konflik-konflik antar negara.

Kenyataannya, negara-negara besar penganut Neo-Liberalisme tersebut mengambil momentum untuk memanfaatkan negara-negara berkembang dan berakibat terjadinya monopoli ekonomi di dunia serta terciptanya bermacam

---

<sup>1</sup> Robert Jackson & George Sorensen *Introduction to International Relations* teri Dadan

sistem dunia baru. Salah satu sistem itu adalah sistem pasar bebas yang diusung oleh Neo-Liberalisme, yang mau tidak mau harus diikuti oleh negara-negara dunia ketiga tersebut. Karena jika tidak, mereka akan dikucilkan dari dunia Internasional.

Sistem ekonomi pasar bebas sendiri adalah dimana kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah dan apabila setiap individu di dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan maka akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh.<sup>2</sup> mekanisme pasar akan dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang efisien dan kemakmuran. Kaum Neo-Liberalis berusaha mewujudkan sistem pasar bebas agar mampu mendapat profit yang lebih banyak lagi. Hal ini mereka wujudkan dalam bentuk lembaga-lembaga Internasional yang membuat peraturan bersama tentang perekonomian global. Pengaruh Neo-liberalisme di negara-negara berkembang bisa dilihat dengan jelas. Berkurangnya kedaulatan negara dalam pemutusan kebijakan ekonomi dalam negeri merupakan salah satu dampak buruk Neo-liberalisme di negara-negara dunia ketiga. Hal ini diakibatkan oleh ketergantungan yang diciptakan sistem dunia antara negara berkembang terhadap negara maju yang memaksa negara-negara ini mengubah kebijakan dan menguntungkan investor yang masuk.

Pada dasarnya, untuk mengurangi ketimpangan pasar dan kelompok kaya dan miskin dalam suatu negara, harus ada intervensi pemerintah dengan membuat kebijakan yang adil bagi rakyatnya. Kenyataannya hal itu justru

---

<sup>2</sup> Sistem ekonomi Pasar Bebas, diakses pada tanggal 3 Februari 2011 dari, <http://www.scribd.com/doc/35271773/Sistem-Ekonomi-Pasar-Bebas>

dimanfaatkan oleh elite pembuat keputusan untuk meraup keuntungan melalui kerjasama investor dengan negara<sup>3</sup>. Sementara itu, pasar tidak mengenal ketimpangan dan tetap berjalan pada koridornya untuk mendapatkan keuntungan.

Hal ini lah yang membuat elite negara-negara berkembang terlena dan lupa kalau mereka punya tanggung jawab terhadap rakyat yang mengakibatkan ketergantungan antara negara dunia ketiga terhadap Negara-negara maju semakin besar. Kemampuan Neo-Liberalisme dalam menekan Negara-negara dunia ketiga untuk tunduk terhadapnya sangatlah kuat. Melalui berbagai forum dan kerjasama, investor mampu masuk ke dalam sistem pemerintahan suatu negara dan mempengaruhi pengambil keputusan kebijakan baik secara paksa maupun secara halus.

Adanya lembaga-lembaga Internasional seperti, *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, serta *World Trade Organisation* (WTO), yang terlahir dengan dalil mencoba untuk mengurangi penduduk miskin di dunia dan mencapai kemakmuran dunia, nyatanya semakin memperburuk keadaan dan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.

Kebijakan-kebijakan ekonomi global dibuat seragam agar dengan alasan agar Negara-negara miskin mampu mengikuti sistem pasar global dan menghindarkan mereka dari kemiskinan dan ikut serta memutar roda ekonomi global.<sup>4</sup> Entah sengaja atau tidak, hal ini sebenarnya merupakan syarat bagi

---

<sup>3</sup> Michael P Torado, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (Jilid Enam), Penerbit Airlangga, Jakarta, 1998, hal 35-36

<sup>4</sup> The International Forum On Globalization, *Globalisasi, Kemiskinan, dan Ketimpangan*, teri. A Widayamartaya "et al" Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2004, hal 8-10

pasar bebas untuk bekerja secara efisien dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari negara-negara miskin.

Salah satu contoh kebijakan itu adalah *Structural Adjustment Program* (SAP) atau Program Penyesuaian Struktural. Kebijakan SAP ini merupakan kebijakan bersama IMF dan World Bank yang dikontrol dengan ketat, dan negara yang tidak mematuhi akan mendapatkan hukuman fiskal. Kebijakan-kebijakan SAP diantaranya adalah penghapusan tarif-tarif yang membantu industri kecil, penghapusan peraturan-peraturan dalam negeri yang sekiranya dapat menghambat atau terlalu mengatur tentang masuknya investasi luar negeri, sampai dengan pertanian dan bahan baku yang berorientasi ekspor.<sup>5</sup> Hal ini jelas tidak menguntungkan negara miskin, sebaliknya menguntungkan perusahaan-perusahaan yang berkuasa.

Pertanian dan bahan baku yang berorientasi ekspor misalnya, hanya akan menambah persediaan yang sudah ada dipasar karena diekspor dari berbagai negara. Hasilnya, harga barang-barang ekspor tersebut akan dijual dengan harga dibawah produksi dan hanya akan membuat negara-negara pengekspor semakin terpuruk. Bukan hanya IMF, WTO, dan World Bank yang menjadi indikasi semakin terpuruknya Negara dunia ketiga di dalam sistem pasar bebas.

Contoh lain pengaruh buruk Neo-Liberalisme di Negara-negara berkembang adalah tentang permasalahan Hubungan Industrial antara tenaga kerja/buruh pabrik dengan perusahaan-perusahaan Multi National

Cooperation (MNC). Para buruh yang bekerja di pabrik-pabrik MNC digaji dengan upah yang sangat rendah dan bahkan diperlakukan semena-mena oleh perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (PHK) sepihak seringkali menjadi problematika yang dihadapi oleh buruh-buruh pabrik yang bekerja di perusahaan-perusahaan Multi Nasional.

Hubungan Industrial haruslah berlandaskan asas-asas kemanusiaan dan mempunyai perngaturan hak dan kewajiban yang baik di dalam sebuah perusahaan. Buruh dan majikan harusnya bekerjasama dalam memajukan perusahaan.<sup>6</sup> Namun pada kenyataannya, di negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Laos dll, buruh digaji dengan upah yang sangat rendah dan seringkali ditindas oleh majikan/perusahaan.

Pengaruh Globalisasi serta Neo-Liberalisme sebagai sistem baru dunia saat ini, demokrasi sekalipun yang dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik saat ini dalam menjalankan sebuah negara, ternyata sudah menjadi celah baru bagi agen-agen Neo-liberalis untuk mengembangkan sayapnya di Negara-negara berkembang.

Dengan alasan mendorong demokratisasi politik dan mendorong kemakmuran, agen-agen Neo-liberalis mencoba mengambil alih kebijakan publik yang di pegang oleh lembaga-lembaga pemerintahan di dunia. Kapitalisme dan Neo-Liberalisme yang telah memunculkan aktor-aktor transnasional baru yaitu perusahaan Multi National Cooperation (MNC), serta forum-forum kerjasama ekonomi, pada akhirnya memperlebar

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, S.H.,M.H., *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, 2009, hal 108-110



ketimpangan distribusi pendapatan serta meluasnya kemiskinan membuat demokrasi itu sendiri terancam dan tidak berjalan sesuai dengan semestinya.<sup>7</sup> Demokrasi telah menjadi alat baru bagi Neo-Liberalisme untuk memperlebar kekuasaannya.

Globalisasi yang saat ini didengung-dengungkan dan dianggap dapat memajukan kesejahteraan dunia kini hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang yang berkuasa. Kemiskinan dan kesenjangan sosial tetaplah menjadi permasalahan utama dan bahkan menjadi semakin memburuk.

Kemajuan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara merupakan harga mati jika ingin menang dalam persaingan dunia saat ini. Lahirnya berbagai lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF yang diikuti dengan dibentuknya beberapa lembaga pasar bebas seperti AFTA, merupakan bukti bahwa Neo-Liberalisme berdiri kokoh sebagai sistem tatanan dunia saat ini. Berkembangnya aktor-aktor transnasional baru yang mempunyai kekuasaan sebagai pemegang ekonomi dunia ketiga yaitu MNC, juga menjadi bukti sah betapa globalisasi menjadi momok menakutkan bagi negara sedang berkembang.

Salah satu negara yang terkena dampak dari Neo-Liberalisme adalah India. India merupakan negara dengan penduduk terbanyak kedua setelah China, dan memiliki rapor buruk tentang kelaparan dan kemiskinan. India merupakan negara bekas jajahan Inggris yang merdeka pada tahun 1947.

---

<sup>7</sup> Nanang Pramuji Mugasejati dan Ucu Hartanto, *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, Fisipol UGM, 2006, Hal 63-65.

Memakai sistem pemerintahan republik federal atau lebih jelasnya Parleментар Bikameral (dua kamar) dengan sistem multipartai yang kuat.

Parlemen India terdiri dari dua kamar yaitu majelis rakyat atau *Lok Sabha*, yang berisikan 545 orang, dan majelis Negara atau *Rajya Sabha* yang berisikan 250 orang. India memiliki 28 negara bagian yang dibagi dalam 6 distrik kota.<sup>8</sup> Negara yang berpenduduk lebih dari satu milliyar ini selalu dianggap lamban dalam meningkatkan pertumbuhan negaranya. Setelah kemerdekaannya, di bawah Perdana Menteri Jawaharlal Nehru memulai pembangunan sektor ekonomi India dengan sistem ekonomi terencana (model Nehru).

Selama periode kekuasaan Nehru, India hanya mengandalkan perusahaan Negara dan menolak pemodal asing. Peran swasta domestik diikutsertakan namun diawasi ketat oleh pemerintahan.<sup>9</sup> Pertumbuhan ekonomi India memang meningkat, tetapi dapat dikatakan gagal memberikan sesuatu yang maksimal. Salah satu sisi negatif model ini adalah munculnya berbagai permasalahan birokrasi.

Proses perizinan menjadi ladang mencari uang, dan muncul sikap pejabat pilih kasih. Model Nehru dengan ekonomi terencana memang tidak banyak menghasilkan bagi India. Kemiskinan dan kelaparan tetap saja melanda negeri ini. Tetapi model Nehru ini justru mempunyai sisi positif dan menjadi titik balik perekonomian India di masa depan. Perdana Menteri Nehru memilih menggunakan sistem ini karena trauma akan masa penjajahan

---

<sup>8</sup> Irwan Suhanda, *India Bangkitnya Raksasa Baru Asia (Calon Pemain di Era Globalisasi)*, Penerbit Kompas, 2007, Jakarta, hal xi-ix.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal 10.

membuat Nehru merasa tidak memerlukan peranan asing selama kurang lebih 44 tahun.

Pada masa-masa itu, India mulai tergoda oleh pengaruh Neo-Liberalisme yang mulai menjangkit di tahun 70-an. Karena kepasrahan dan ketidakberdayaan, India merasa perlu mengubah sistem ekonominya agar menjadi lebih baik lagi. Tahun 1991 menjadi titik balik perekonomian India. Pada 1991, P.V. Narasimha Rao menjadi perdana menteri dan melakukan perubahan penting dalam kebijakan ekonomi. Banyak kontrol terhadap sektor swasta yang dihapus dan monopoli negara pada bidang-bidang tertentu, seperti transportasi udara, diperlonggar.

Secara umum, ekonomi menjadi terbuka dengan adanya pengurangan kontrol tarif dan dorongan bagi pihak asing untuk berinvestasi. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan terutama untuk meraih angka pertumbuhan yang lebih tinggi. Sistem seperti ini bertahan sampai dengan saat ini. Pertumbuhan ekonomi India tertinggi terjadi 2010 lalu, yaitu mencapai 11 persen. Angka yang cukup luar biasa mengingat India bukanlah negara terkategori maju. India juga mulai melebarkan sayapnya di berbagai industri dan bidang teknologi. Tetapi ada hal yang aneh dalam sistem perekonomian India saat ini.

Jika memang India telah beralih ke Neo-Liberalisme beberapa tahun terakhir, pada kenyataannya turut campur pemerintah masih sangat kental terlihat dalam penentuan kebijakan India. India tidak sepenuhnya menverahkan perekonomian kepada mekanisme pasar

Seperti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk Usaha Kecil (UK) sampai-sampai 40 persen pertumbuhan perekonomian India ditopang oleh UK. Atau sektor pertanian yang sekitar 58 persen penduduknya bekerja di sektor ini dan menyumbang 22 persen Produksi Domestik Bruto (PDB). Masyarakat India masih menggunakan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sisi teknologi, India sangat luar biasa dengan menciptakan berbagai teknologi yang tergolong murah namun bermutu. Mulai dari satelit mikro, sampai dengan bahan bakar *compressed natural gas* untuk mengurangi polusi di India<sup>10</sup>

Baik dari segi transportasi, pemenuhan kebutuhan pokok, sampai dengan teknologi, masyarakat India masih menggunakan produknya sendiri. Disamping itu, sumber daya manusia India sangat luar biasa pekerja keras. Mereka rela digaji berapapun dalam pekerjaannya. Hal ini juga yang membuat pasar India masih tergolong sulit dimasuki, lantaran masyarakat India masih memakai kesederhanaannya dalam hidup sehari-hari.<sup>11</sup> Terlepas dari itu, pengaruh kaum yang menentang keras Neo-Liberalisme masih kuat dan rata-rata berasal dari partai sayap kiri India dan sektor swasta di India. Faktor budaya dan faktor sejarah sangat mempengaruhi perkembangan India masa kini.

Adalah tokoh perjuangan India yang membawa pengaruh yang besar itu terhadap masyarakat India Mohandas Karamchand Gandhi atau sering

disebut Mahatma Gandhi. Masyarakat India saat ini bukan hanya sekedar mewarisi ajaran Gandhi, tetapi juga mengaktualkannya.

Falsafah seperti *Satyagraha*, *Ahimsa*, *Sarvodaya*, maupun *Swadeshi*, masih tetap mewarnai kehidupan India dalam sehari-harinya. Gandhi sendiri bukan hanya seorang pembawa perdamaian, tetapi juga mempunyai pemikiran politik dan visi ekonomi yang luar biasa, terutama tentang kesejahteraan. Gandhi yang hidup di masa penjajahan Inggris, merasakan betul penderitaan rakyat India di masa lalu. Lalu Gandhi membangun sebuah konsep Welfare State yang bukan hanya pada materi, tetapi juga manusia sebagai pemeran utamanya, atau singkatnya materialis-spiritual.<sup>12</sup>

Dalam perang kemerdekaan melawan Inggris, salah satu bentuk perlawanan ekonomi yang dilakukan oleh Gandhi adalah dengan memboikot masuknya tekstil hasil industri tekstil Inggris yang berkembang pesat berkat bantuan mesin uap dan kapas murah dari India.

Setelah itu, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Gandhi mempopulerkan pemintalan *khadi* (kain tenun khas India) dengan menggunakan *charka* (alat tenun khas India) yang pada akhirnya diabadikan sebagai simbol ekonomi kerakyatan yang juga sering disebut sistem ekonomi roda pintal.

Dampak dari kebijakan ini terlihat begitu jelas. Terjadi pengangguran besar-besaran di Inggris setelah India tidak lagi mengekspor kapas murah lagi ke pabrik kapas di Leichestre. Gandhi juga dikecam akibat kampanyenya

---

<sup>12</sup> Visi ekonomi Mahatma Gandhi, diakses pada tanggal 27 Februari 2011  
<http://www.compass.net/indonesia/news/ekonomi/250/visi-ekonomi-Mahatma-Gandhi.html>

mempopulerkan *khadi* di kalangan masyarakat India dan dianggap anti-industrialisasi.

Namun ia justru mengatakan bahwasanya India tetap menerima mesin-mesin uap itu jika memang dapat mengurangi kelaparan dengan catatan, mesin-mesin itu harus tersentralisasi dan dikuasai oleh Negara, dan porsi terbesar pembangunan sandang dan pangan tetap ada di tangan rakyat desa.

Salah satu konsep Gandhi yang dipertahankan sampai saat ini adalah dengan tetap menerapkan sistem ekonomi *swadeshi*. Sistem ekonomi *swadeshi* adalah sistem dimana masyarakat menggunakan produksi dalam negeri sehingga mempunyai daya tawar yang tinggi dan mampu melawan kekuatan industri asing.<sup>13</sup> Di India sendiri, Usaha Kecil (UK) semaksimal mungkin dijadikan penopang utama perekonomian Negara dan dilindungi oleh Negara. Usaha Kecil dilindungi dan dibuatkan kebijakan yang pada awalnya mencadangkan subsektor industri tertentu yang hanya boleh dimasuki oleh UK saja sementara jika usaha menengah dan besar ingin masuk, maka mereka harus mengekspor 50 persen produksinya.

India memang tengah bergolak dengan masuknya Neo-Liberalisme ke berbagai sektor di dalam negeri. Namun dengan tertanamnya budaya dan pemikiran-pemikiran Gandhi, mampu menjadi penangkal melebarnya sayap Neo-Liberalisme di India. Pemikiran Gandhi sendiri diakomodasi dalam *National Community Development Program*

---

<sup>13</sup> Mahatma Gandhi dari satyagraha menuju Negara kesejahteraan, diakses pada tanggal 10 Februari 2011 dari <http://gazali.wordpress.com/2008/01/07/mahatma-gandhi-dari-satyagraha->

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik sebuah masalah yang akan dianalisa yaitu :

**“Bagaimanakah Konsep *Welfare State* Ala Mahatma Gandhi Diimplementasikan Dalam Konteks India Masa Kini Dalam Menghadapi Neo-Liberalisme”**

### D. Kerangka Pemikiran

#### a) *Konsep Welfare State Mahatma Gandhi*

Di dalam konsepnya tentang kesejahteraan, dalam membentuk sebuah *welfare state*, visi ekonomi kenegaraan Gandhi tampak berbeda dengan visi ekonomi para penganut paham strukturalis. Jika paham kapitalisme menekankan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai hal yang determinan, Gandhi tidak demikian. Prinsip pembangunan ekonomi negara kapitalis Barat adalah material.

Sedangkan konsep Gandhi adalah hasil perpaduan antara unsur spiritual dan material. Bagi Gandhi, kesejahteraan manusia dibagi dalam kesejahteraan material dan nonmaterial<sup>14</sup>. Dasar logikanya adalah, bahwa praktik kebaikan tidak lepas dari hal-hal material, maka kebaikan juga harus diterapkan dalam seluruh aktivitas manusia. Pijakan prinsip ini adalah, bahwa manusia merupakan pertimbangan utama.

---

<sup>14</sup>Francis Alappatt, *Mahatma Gandhi ( prinsip hidup, pemikiran politik, dan konsep ekonomi)*, Penerbit Nusamedia, Terj. S. Farida, 2005, Hal 256.

Konsep *welfare state* yang dikonsepsikan oleh Gandhi dapat dibagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

1) ***Satyagraha***, yang artinya berpegang teguh pada kebenaran. Prinsip ini banyak menjelaskan tentang bagaimana hidup dalam kerukunan dan landasan moral menjadi bagian terpentingnya. Gandhi tidak menginginkan adanya perbedaan kelas sosial. Meskipun Gandhi seorang Hindu yang taat, Ia tetap berpendapat semua orang itu sama derajatnya. Gandhi sangat menentang pengkastaan yang ada dalam ajaran Hindu. Gandhi beranggapan bahwasanya semua manusia berhak bersuara dan menyatakan aspirasinya terlepas dari golongan mana ia berasal.<sup>15</sup> Prinsip lain yang terkandung dalam *Satyagraha* diantaranya adalah anti kekerasan, dan anti pembedaan baik kasta maupun agama. Memecahkan permasalahan Multikultural memang sangat sulit, terlebih, Gandhi dibunuh oleh seorang Hindu fanatik karena Ia dianggap terlalu membela Islam. Apalagi ditambah dengan permasalahan perbatasan antara India dan Pakistan yang melibatkan kelompok Muslim dan Hindu. Namun hal ini juga tidak menyurutkan semangat para aktivis di India untuk terus memperjuangkan pluralisme di India. Disisi lain dalam ekonomi, Gandhi menggambarkan bahwasanya kesetaraan bukan berarti semua harus sama. Pendapatan sama, atau yang diterima harus sama. Namun justru Gandhi mempersilahkan semua orang untuk mengembangkan potensinya dan mencapai kemakmuran individunya. Namun, aspek

---

<sup>15</sup> M.K. Gandhi, *Mahatma Gandhi Sebuah Autobiografi*. Penerbit Narasi, Teri, Andi



moral harus ada di atas aspek ekonomi, jadi si kaya nantinya harus dan berkewajiban membantu si miskin. Namun bukan berarti jika dibantu si miskin tidak bekerja. Dalam falsafah ini Gandhi juga menjelaskan bahwasanya rakyat India juga harus bekerja keras dalam menghidupi dirinya sendiri dan belajar untuk tidak terlalu tergantung terhadap orang lain. Hal inilah yang membuat rakyat India pekerja keras dan tanpa pamrih.

2) *Swadeshi*, yaitu penggunaan produk dalam negeri dengan tujuan mengembangkan Industri dalam negeri dan menghemat devisa. Konsep ini lebih mengedepankan pemakaian produk dalam negeri, sehingga dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang bermutu. Gandhi pertama menerapkan konsep ini ketika Gandhi dan sejawatnya memperjuangkan pemakaian *Khadi* yang menjadi simbol sistem ekonomi roda pintal atau *Charka*.<sup>16</sup> India sendiri memiliki banyak Industri dan UKM di negaranya. Sekarang ini, 40 persen ekonomi India bergantung pada kinerja UKM. Banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung kinerja UKM seperti penelitian, kredit, dan lingkungan usaha yang baik. Jadi meskipun India telah meninggalkan sistem ekonomi sosialis dan menuju pasar bebas, proteksi UKM selama 40 tahun membuat UKM kuat dan tidak takut bersaing dengan investor asing. Terlebih lagi, India hanya mengimpor jika memang benar-benar membutuhkan.

---

<sup>16</sup> Alappat, *Op. Cit.* Halaman 105-107

## ***b) Konsep Welfare State Kontemporer (Modern)***

*Welfare state* atau yang lazim di sebut sebagai Negara Kesejahteraan, merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Dengan demikian, pada dasarnya keberadaan konsep *welfare state* tidak akan dapat kita pisahkan dari sistem politik-ekonomi yang berkembang.<sup>17</sup> Dr. Goran Adamson, yang merupakan seorang dosen di Land University, Swedia, menjelaskan bahwasanya konsep *Welfare state* telah mengalami evolusi di zaman modern ini. Modernitas disini dimaknai sebagai kemampuan negara dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran dan tanggung jawab negara menjadi begitu besar terhadap warga negaranya karena negara akan bersikap dan memposisikan dirinya sebagai “teman” bagi warga negaranya.

Makna kata “teman” merujuk pada kesiapan dalam memberikan bantuan jika warga negaranya mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan. Birokrat merupakan alat dan garda depan negara yang secara langsung melayani warga negara. Birokrat “diharuskan” bersikap netral dengan cara tidak menjadikan latar belakang politik dan sosial warga Negara sebagai dasar pertimbangan pemberian pelayanan. Penganut Negara Kesejahteraan percaya jika negara memberikan banyak bagi warga negara maka akan terjadi penurunan demonstrasi kekerasan maupun anarkisme

yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dipinggirkan atau merasa bahwa distribusi keuntungan negara tidak berjalan dengan baik.

Empat hal yang disediakan oleh Negara Kesejahteraan kepada rakyatnya antara lain:

1. Menciptakan keamanan
2. Mensuplai pelayanan sosial
3. Mengurangi biaya sosial masyarakat
4. Mengontrol angka reproduksi

Negara Kesejahteraan menolak konsep revolusi sosial ala kaum Marxis, karena tanpa revolusi yang diyakini kaum Marxis, kesejahteraan warga negara tetap bisa diaplikasikan melalui konsep *welfare-state*. Konsep revolusi Marxis digantikan oleh perubahan bertahap yang tercermin dalam agenda reformasi yang cenderung tidak radikal. Nilai penting yang dibawa Negara Kesejahteraan adalah mereduksi jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan cara mendistribusikan uang dari si kaya kepada si miskin.<sup>18</sup> Distribusi keuntungan yang diatur oleh negara ini salah satu caranya dilakukan dengan menempatkan pihak buruh dan pengusaha secara seimbang, memiliki hak yang sama dan setara.

Dalam kerangka Negara Kesejahteraan, pihak buruh tidak mendominasi sektor dan kebijakan ekonomi namun menjadi aktor aktif dalam membangun perekonomian sejajar dengan para pengusaha. Terdapat pula para pengusaha yang tanpa intervensi dari Negara berupaya

---

<sup>18</sup> Negara Kesejahteraan, diakses pada tanggal 17 April 2011 dari <http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1>

membangun forum terbuka dengan para buruh. Forum ini bertujuan untuk mencapai negosiasi kebijakan berdasarkan prinsip *win-win solution* antara pihak pengusaha dan pihak buruh. Negara Kesejahteraan mempercayai bahwa perubahan ekonomi secara cepat dan radikal justru akan memicu bencana besar. Laju perekonomian yang perlahan namun pasti akan membawa keselamatan ekonomi bagi Negara kesejahteraan.

Namun, segala sesuatu memiliki sisi baik dan buruk, begitu pula dengan sistem Negara kesejahteraan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki hak penuh untuk menekan dan memaksa warga negaranya dalam melakukan berbagai hal yang dianggap penting oleh Negara. Bentuk paksaan dan tuntutan seperti ini secara langsung membuat warga negara kehilangan kebebasannya. Hal ini menjadi sangat logis, jika mengingat bahwa kebebasan tidak berbanding lurus dengan keselamatan dan keterjaminan.

Masalah-masalah yang kerap atau sering terjadi di dalam sistem Negara kesejahteraan kontemporer adalah:

- 1) Pungutan pajak yang tinggi. Sistem Negara kesejahteraan menyediakan berbagai layanan gratis kepada masyarakatnya namun Negara menetapkan angka pajak yang sangat tinggi. Di Swedia misalnya pajak

- 3) Negara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh warga negaranya sehingga negara akan menyalahkan sikap warganegara atas suatu tindakan yang berseberangan dengan aturan negara.
- 4) Tidak ada kebebasan. Kebebasan berbanding terbalik dengan keselamatan. Kebebasan adalah kekuatan terbesar seorang individu dan ketika kebebasan secara mutlak bisa didapatkan maka tingkat keselamatan akan semakin rendah.

Selain itu, sisi negatif dari Negara kesejahteraan adalah semangat yang dimiliki warga negaranya cenderung menurun sejak pemerintah telah menjamin keseluruhan hidup mereka (kesehatan, perumahan, pendidikan dll). enggambaran sederhananya seperti ini, jika pendapatan suatu warga Negara meningkat maka beban pajak yang dibayar juga akan meningkat. Sedangkan jika mereka tidak bekerja, mereka tidak akan dikenai kewajiban membayar pajak. Jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah sama untuk warga miskin atau warga kaya.

Potret sosial seperti ini membentuk satu perspektif di tengah masyarakat "buat apa bekerja keras jika akhirnya akan dikenai pajak yang tinggi dan mendapatkan jaminan yang sama dengan warga miskin dari pemerintah?"

"Buat apa bekerja keras jika pajak yang dibayarkan, diberikan untuk kaum miskin yang pemalas?" Perspektif seperti ini lambat laun namun pasti telah menggerogoti semangat kerja keras yang dimiliki oleh generasi terdahulu. Konsep *welfare state* seringkali bergantung terhadap

kondisi sosial-politik yang ada di dalam negaranya. Maka dari itu, *welfare state* mempunyai fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan budaya suatu Negara.

Konsep *welfare state* kontemporer ini akan dibandingkan dengan konsep *welfare state* Gandhi dalam implementasinya di India dalam menahan Neo-Liberalisme.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberi gambaran pengaruh buruk Neo-Liberalisme di era Globalisasi.
2. Untuk memberi alternatif ideologi terhadap pengaruh Neo-Liberalisme melalui konsep *welfare state* Mahatma Gandhi.
3. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana S-1 Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Hubungan Internasional, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penulisan skripsi ini dengan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan fenomena yang terjadi, teknik pengumpulan data dari studi pustaka. Data diolah melalui literatur-literatur buku, jurnal ilmiah dan media baik cetak

## G. Jangkauan Penelitian

Wilayah kajian skripsi ini secara umum merupakan analisa yang menggambarkan tentang pengaruh Neo-Liberalisme di dunia saat ini yang dianggap tidak baik karena, hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu sehingga menciptakan kesenjangan dalam tatanan dunia saat ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk menahan laju Neo-Liberalisme yang meluas yang salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *welfare state* Mahatma Gandhi dan menjadikannya sebuah ideologi yang diharapkan mampu menjadi ideologi alternatif menahan laju Neo-Liberalisme.

## H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan akan dibagi dalam lima BAB yang akan diuraikan lebih dalam dan terdiri dari:

BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari, Alasan Pemilihan Pudel, Latar Belakang Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian, Hipotesa, Teknik Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, akan menjelaskan tentang perbandingan konsep *welfare state* Mahatma Gandhi dengan konsep *welfare state* modern lainnya dalam menahan Neo-Liberalisme.

BAB III akan menjelaskan tentang proses reaktualisasi ideologi

BAB IV, akan menjelaskan tentang hasil dari reaktualisasi ideologi *welfare state* Gandhi di India masa kini.

BAB V akan menjelaskan tentang kesimpulan dari semua